

**EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA
ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC
COMMUNITY***



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
Galih Putra Destianto
NIM. E0015159**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY*

Oleh:

Galih Putra Destianto

NIM. E0015159

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 29 April 2019

Dosen Pembimbing Utama



Purwono Sungkowo R, S.H., M.H

NIP. 196106131986011001

Dosen Pembimbing Pembantu



Wida Astuti, S.H., M.H

NIP. 196007151988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC* *COMMUNITY*

Oleh:

Galih Putra Destianto

NIM. E0015159

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

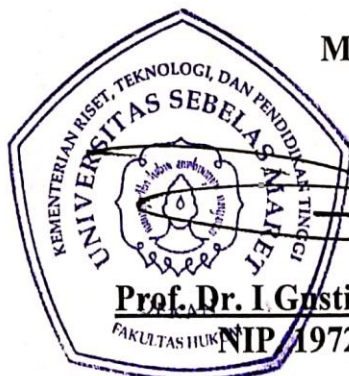
Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. :
NIP. 197111022006042001
Ketua
1. Purwono Sungkwo R, S.H., M.H. :
NIP. 196106131986011001
Sekretaris
2. Wida Astuti, S.H., M.H. :
NIP. 196007151988032001
Anggota



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Galih Putra Destianto

NIM : E0015159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 April 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Galih Putra Destianto

NIM. E0015159

MOTTO HIDUP

***Tanamkan kembali nilai-nilai progresif dalam diri
kita dan lingkungan sekitar.***

(Galih Putra Destianto)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan basmalah dan hamdalah berkat rahmat dan karunia Allah SWT, dengan kerendahan hati penelitian hukum ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Budi Kuswanto dan Watini Supriyatun yang telah merawat dan mendidik sejak dalam kandungan sampai detik ini penulis bisa memaparkan hasil dari penelitian hukum ini.

Kakak penulis Amelia Anzani sebagai saudara dan juga senior penulis dalam kehidupan ini yang telah banyak membantu.

Seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya mengirimkan doa dan perhatian.

Sahabat-sahabat penulis sejak kecil sampai detik ini, yang sangat berjasa membantu kehidupan penulis, sehingga penulis bisa sampai titik ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu akan penulis banggakan.

Dan yang terakhir, penelitian hukum ini penulis persembahkan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Inilah penelitian hukum penulis sebagai sumbangsih pemikiran dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum.

ABSTRAK

Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY*. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ditengah era ASEAN *Economic Community* (AEC), serta untuk mengetahui pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan konfirmasi dengan pelaksana undang-undang. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hadirnya AEC sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara memiliki salah satu fokus yaitu memperluas pasar tenaga kerja terampil. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi sasaran strategis tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, fungsi pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi dilakukan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Selain itu, pengawasan ditambah dengan adanya Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi gabungan pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing di DKI Jakarta. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengendalian, penggunaan, dan pengawasan Tenaga Kerja Asing. Undang-Undang Keimigrasian melingkupi pengawasan lalu lintas keimigrasian beserta penegakan hukumnya. Peraturan mengenai pedoman dan tata cara pengawasan tenaga kerja asing di daerah.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum efisien, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sudah memadai hanya saja implementasinya belum dilaksanakan dengan optimal dan efisien.

Kata Kunci: Pengawasan, Tenaga Kerja Asing, DKI Jakarta, ASEAN Economic Community (AEC).

ABSTRACT

Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFFICIENCY THE SUPERVISORY FUNCTION OF FOREIGN LABOR IN DKI JAKARTA PROVINCE IN THE ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This study aims to determine the supervision by the central government and the regional government of DKI Jakarta Province on Foreign Labour in the middle of the era ASEAN Economic Community (AEC), and also to know the guidelines and legislation to carrying out the supervisory function of foreign labour.

This research is a normative legal research or doctrinal research with a statute and conceptual approach. This research uses sources of legal material consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by library research and confirmation with implementing the law. Technical analysis of legal materials uses deductive syllogism analysis techniques.

Based on the results of the research and discussion, the presence of AEC as a forum to improve the economy in Southeast Asia has one focus to expanding the market for skilled labor. The Province of DKI Jakarta as the capital city of the Republic of Indonesia is a strategic target of labor for Indonesia. Overcoming this, the supervisory function of the use of foreign labor is carried out by the central government in collaboration with the regional government of DKI Jakarta province. Coordination is carried out between the Ministry of Manpower, the Ministry of Law and Human Rights, and DKI Jakarta government through DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office. In addition, supervision was added to the presence of the foreign Monitoring Team, Foreign Community Organizations, and Foreign Labor from DKI Jakarta Government whose member consisted of various joint government companies. To implement this, guidelines and legislation are needed as a legal protect in carrying out the supervision of foreign labor in DKI Jakarta. The legislation is the Manpower Act which regulates controlling, use and supervision of foreign labor. The Immigration Act about supervision of immigration traffic along with law enforcement. Regulations concerning about guidelines and procedures for supervising foreign labor in the Province of all Indonesia area.

The conclusion in this study is that the supervision carried out by the central government in collaboration with DKI Jakarta Government has not been efficient, this is due to the existence of several inhibiting factors in carrying out the supervisory function. However, the guidelines and legislation relating to the supervision of foreign labor are adequate, but the implementation has not been implemented optimally and efficiently.

Keywords: *Supervision, Foreign Labor, DKI Jakarta, ASEAN Economic Community (AEC).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul **“EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY*”** dengan baik dan lancar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada bulan April tahun 2018 lalu, Presiden RI mengeluarkan kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Yang mana hal tersebut langsung disambut dengan demonstrasi serikat pekerja dalam memperingati hari buruh internasional *“Mayday”* pada 1 Mei 2018. Berdasarkan hal tersebut, banyak pemberitaan maupun pembicaraan orang-orang mengenai tenaga kerja asing ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Guna mengatasi keributan yang ada di masyarakat, penulis berusaha menuangkan segala kritik dan saran untuk bangsa dan negara ini melalui penulisan hukum (skripsi) ini. Substansi daripada penulisan hukum (skripsi) ini adalah meneliti dan mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing ditengah era ASEAN *Economic Community*, khususnya di provinsi DKI Jakarta agar dapat mewujudkan persaingan tenaga kerja yang sehat dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Motivasi tidak datang dari diri sendiri, namun juga dari berbagai pihak disekeliling penulis. Oleh karenanya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan rezeki yang tak terduga diberikan kepada penulis;
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut R. H, S.H., M.M, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu dalam penulisan hukum (skripsi) ini, khususnya dalam memberikan arahan kepada penulis dengan dosen pembimbing;
4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Bapak Purwono Sungkowo Raharjo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, kritik, dan saran, sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar;
6. Ibu Wida Astuti S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah banyak membantu dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Bapak Dona Budi Kharisma, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada penulis untuk menjadi bagian sebagai asisten peneliti dan asisten dosen;
8. Bapak Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H, yang telah memberikan saran kepada penulis, pada saat awal pengajuan judul penulisan hukum (skripsi) ini;
9. Tim Pengelola Penulisan Hukum (Tim PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelenggarakan teknis penulisan hukum (skripsi) ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum hingga terselesaikannya penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Bapak Hananto, selaku kepala Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yang telah memberikan waktu dan pemikirannya sebagai penunjang dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
12. Bapak Suwarno, selaku pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, yang juga telah memberikan waktu dan pemikirannya kepada penulis sebagai penunjang dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;

13. Kedua Orang Tua penulis, Budi Kuswanto dan Watini Supriyatun yang tiada henti memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan materiil yang tak ternilai, semoga kelak penulis bisa membalas dengan kebahagiaan meskipun takkan pernah bisa sepadan balasan yang diberikan. Dan juga kakak penulis, Amelia Anzani terima kasih telah membantu dalam segala hal hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini;
14. Andina Larasati yang selalu mendampingi, memberikan semangat, memberikan kebahagiaan dan nasihat dalam proses penyusunan skripsi;
15. Te 2K10, M. Dwiky Ambiya (Bang Ipul) dan Ceje, terima kasih telah menambah alumni SMA 6 Jakarta di Universitas Sebelas Maret, semangat terus, teruslah mencari ilmu dan pengalaman. SALAM DONGKER!
16. Teruntuk M. Hafiz Dwidhani (Hafiz/arek malang) Teman pertama kali yang saya kenal saat di Solo, saat masuk ke FH UNS, teman sekelompok saat Orientasi Mahasiswa Baru tahun 2015. Teman disaat penulis kebingungan harus apa dan mau kemana kau datang mengajak, terima kasih fiz. SALAM SATU JIWA PERSIJA-AREMA!
17. Peer Group penulis selama kuliah di FH UNS, yang menamakan dirinya FAMILIA. Hafiz, Ghani, kurnia, reinan, deni, raju, jelang (mancak/cakman), nabnab, hilmi, aji, sandi, bintang, ben, haekal, mamat, pedro, terima kasih telah meramaikan hari-hari kuliahku. Semangat selalu kawan, jangan lupakan persaudaraan yang telah dilahirkan, pertahankan silaturahmi;
18. Warga Pemasarakatan S-Kost, haekal, ben, bintang, clement, syafril. Terima kasih telah menggedor-gedor pintu dan jendela kamar penulis, mengingatkan penulis saatnya bangun dan saatnya menjemput mimpi;
19. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH UNS) Kabinet Reformasi Aktif tahun 2016, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih telah memberi pelajaran yang sangat berharga kepada penulis dalam meniti karir keorganisasian di kampus;
20. Keluarga besar DEWAN MAHASISWA UNS (DEMA UNS) tahun 2017, khususnya Komisi IV. Terima kasih telah mengajarkan kepada penulis jalan yang lurus dalam perjuangan;

21. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Jawa Tengah (FL2MI JATENG) khususnya Komisi Legislasi&Advokasi serta legislatif soloraya. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat hebat dalam memperjuangkan sesuatu;
22. Telkomsel Apprentice Program Solo (TAP Solo) dan TAP Jateng Batch 1. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi masa depan penulis;
23. Tim KKN UNS Desa Pulutan, Boyolali. Fadhly, ivan, hana, yitia, yuli, wanda. Semoga masing-masing selalu mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dibidangnya masing-masing. Segera kita silaturahmi ke rumah Pak Carik dan bertemu dengan suasana sejuk dan hangat warga Pulutan;
24. Keluarga Besar Kelompok Studi dan Penelitian “PRINCIPIUM” (KSP “Principium” FH UNS) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam hal karya tulis-menulis. Lebih khusus Divisi Humas 2017/2018;
25. Keluarga Besar Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semoga kelak kita semua dapat membawa nama baik almamater tercinta;
26. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang telah berjasa kepada penulis, telah membantu dan mendoakan penulis.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah membantu akan mendapatkan balasan kebaikan. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk bangsa dan negara Indonesia. **PROUD TO BE INDONESIAN!**

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 April 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Umum tentang Teori Sistem Hukum	17
2. Tinjauan Umum tentang Teori Efisiensi	26
3. Tinjauan Umum tentang Birokrasi Ideal	29
4. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	36
5. Tinjauan Umum tentang Fungsi Pengawasan.....	38
6. Tinjauan Umum tentang ASEAN <i>Economic Community</i>	42
B. Kerangka Pemikiran.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta pada Era ASEAN <i>Economic Community</i>	48
1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta	48
2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	54
3. Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing	58
4. Pengawasan terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta pada Era ASEAN <i>Economic Community</i>	66
a. Pengawasan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	74
b. Pengawasan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.....	79
5. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta	89
B. Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Pengawasan yang Efisien terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta	93
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	95
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	97
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	99
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	101
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga	

Kerja Asing	103
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta.....	105
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir	46
Bagan 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta	52
Bagan 3. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	57
Bagan 4. Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	62
Bagan 5. Paket Kebijakan Kerjasama Ekonomi Negara ASEAN dalam Rangka ASEAN <i>Economic Community</i>	67
Bagan 6. Model Pengawasan terhadap Tenaga Orang Asing pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	76
Bagan 7. Model Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing yang dilaksanakan oleh Disnakertrans DKI Jakarta	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Kewarganegaraan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018.....	69
Tabel 2. Indikator Kinerja Penanaman Modal	71
Tabel 3. Statistik Jumlah Tenaga Kerja Asing di Wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut Jabatan dan Lokasi Kerja pada Tahun 2018	81

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cetakan ke-4 Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: USU Press.
- Charles D. Drake. 1973. *Labour Law*. London: Sweet and Maxwell United.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Diterjemahkan oleh M. Khozim). Bandung: Nusa Media.
- Lon Luvois Fuller. 1969. *The Morality of Law: Revised Edition*. London: Yale University Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-IV. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Ketiga. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 2015. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. (Diterjemahkan oleh Slamet Rijanto). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Richard A. Posner. 1994. *Economic Analysis of Law*. Ed. 4. USA: Harvard University Press.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seree Nonthasoot. 2017. *Humane Aspects of the People-Centred, People-Oriented ASEAN Economic Community: Global Megatrends, Implications for the ASEAN Economic Community*. ASEAN and Singapore Institute of International Affairs.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- _____. 2014. *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wawan Muhwan Hariri. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Jurnal, Artikel, dan Publikasi Ilmiah Lainnya:

- Ahmad Hunaeni Z dan Tanti Kirana Utami. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2.

- Anthon F. Susanto. 2010. "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)". *Jurnal Keadilan Sosial*. Edisi 1.
- Aizah. 2017. "Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen, dan Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia". *Jurnal Lex Librum*. Volume III Nomor 2 Juni 2017.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti. 2014. "Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- Bahder Johan Nasution. 2015. "Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila". *Jurnal Inovatif*. Volume 8 Nomor 1.
- Deni Nuryadi. 2016. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 2. September 2016. Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Elga Andina, September 2015, *Hambatan Mental TKI dalam Pasar Kerja yang Semakin Kompetitif*, Makalah Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Infomasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII No. 17.
- Fajar Usman. 2016. "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Daya Saing Investasi Indonesia". *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Volume 3 Nomor 1.
- Fathoni. 2015. "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Penelitian Hukum dan Supremasi Hukum*. Volume 21 Nomor 2.
- Fitriatunnisa dan Faisyal Rani. 2016. "Dampak Tenaga Kerja Asing terhadap Sosial Kemasyarakatan, pada Masyarakat Kota Dumai". *JOM FISIP Universitas Riau*. Volume 4 Nomor 1.
- Heriyono. 2013. "Hubungan Industrial (Teori dan Implementasi)". *Jurnal Ekonomi*. Volume 6 Edisi 4.
- Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3.
- I Nyoman Putu Budiarta. 2018. "Work Permit for Foreign Workers in Indonesia". *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*. Volume 21, Special Issues.
- Johannes Dieter Steinert. 2014. "Migration and Migration Policy: West Germany and the Recruitment of Foreign Labour, 1945-61". *Journal of Contemporary History*. Volume 49 Number 1.
- John Pastor Ansah, Crystal M. Riley. 2015. "The Impact of Population Dynamics and Foreign Labour Policy on Dependency: The Case of Singapore". *J Pop Research*. Juni 2015. Singapore: Springer Science and Business Media Dordrecht.
- Joseph S. Chen dan Wei Wang. 2015. "Foreign Labours in Arctic Destinations: Seasonal Workers Motivation and Job Skills". *Current Issues in Tourism*. Volume 18 Number 4. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Junaedi. 2005. "Ombudsman Uni Eropa: Basis Hukum, Wewenang, dan Perannya dalam Menerima Pengaduan Masyarakat Uni Eropa". *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*. Volume 1 Nomor 2.
- Kamala Vainy Pillai, Rajah Rasiah, dll. 2015. "The Impact of Trans Pacific Partnership (TPP) agreement on US and Malaysian Business Foreign Labour Practices". *Procedia Social and Behavioral Sciences*.

- Kasyful Mahli. 2015. "Negara Kesejahteraan dalam Konteks Pembangunan Wilayah". *Jurnal Ekonomi*, Volume 18 Nomor 1.
- M.A.O Mydin, N.R. Buyung, dll. 2014. "Trends and Reliance on Foreign Labourers in Malaysia: Conventional Construction versus Industrialized Building System Construction". *SHS Web of Conferences*.
- Mohd. Arif Marhani, Hamimah Adnan, dll. 2012. "Dependency of Foreign Workers in Malaysian Construction Industry". *Built Environment Journal*. Volume 9 Number 1.
- Muhadam Labolo. 2013. "Characteristic of Weber Bureaucracy and Its Relevance in Indonesia". *Journal Asian Social Science*, Volume 9 Number 2.
- Muhadam Labolo dan Etin Indrayani. 2017. "Bureaucratic Reform and the Challenge of Good Governance Implementation in Indonesia". *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*. Volume 2 Number 4.
- Patricia Cortes dan Jose Tessada. "Low-Skilled Immigration and The Labour Supply of Highly Skilled Women". *American Economic Journal: Applied Econommics*.
- Ramesh Kumar Moona H. M, Charles Ramendran SPR, dll. 2012. "The Impact of Employment of Foreign Workers: Local Employability and Trade Union Roles in Malaysia". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Volume 2 Number 10. October 2012.
- Revina Aprilia Dewantari dan Munawar Kholil. 2018. "Penerapan Teori Efisiensi dalam Pendekatan *Rule of Reason* pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Privat Law*". Volume VI Nomor 2, Juli-Desember 2018. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Saputri Ratu Penghuni. 2017. "Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung". *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo. 2005. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 1 Nomor 1.
- Stephanie Elisa. 2018. "The Impact of the Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia on Indonesia's Relationship with China". *Journal of International Relations*. Volume 4 Number 3. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Suprihatmi Sri Wardiningsih. 2011. "Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial dalam Meminimalisasi Konflik Industri". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Volume 11 Nomor 1.
- Torben Dall Schmidt dan Peter Sandholt Jensen. 2012. "Social Networks and Regional Recruitment of Foreign Labour: Firm Recruitment Methods and Spatial Sorting in Denmark". *Papers in Regional Science*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Trialen Lumban Gaol. 2016. "Membangun dan Meningkatkan *Knowledge Worker* dalam Memenangkan Pasar MEA". *Jurnal Hubungan Luar Negeri*. Volume 2 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Permenkumham RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dokumen Resmi:

ASEAN. Desember 1995. *ASEAN Framework Agreement on Services*. Jakarta: Asean Secretariat.
ASEAN. Januari 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint 2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
ASEAN. August 2014. *ASEAN Qualification Reference Framework (AQR)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
ASEAN. Februari 2017. *Towards ASEAN Economic Community 2025: Monitoring ASEAN Economic Integration*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mei 2017. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018*. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tesis:

Sam Fernando. 2013. *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*. Thesis. Malang: Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Pustaka Maya:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Juli 2016. *Rapat Koordinasi terkait Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Wilayah DKI Jakarta*. <http://bakesbangpoljakarta.com/content/news/rapat-koordinasi-terkait-pemantauan-tenaga-kerja-asing-di-wilayah-dki-jakarta>. Diakses pada tanggal 13 September 2018, Pukul 00.39 WIB.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. April 2017. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 6 Maret 2019, Pukul 20.38 WIB.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kerjasama Indonesia-ASEAN*. [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx). Diakses tanggal 7 Maret 2019, Pukul 16.12 WIB.
- Ombudsman Republik Indonesia. April 2018. *Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA)*, <http://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>. Diakses pada tanggal 12 September 2018, Pukul 17.00 WIB.

Lampiran 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keimigrasian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
Jalan Warung Buncit Raya Nomor 207 Jakarta Selatan 12760
Telepon (021) 79170907 Faksimili (021) 79170910
Website : jakartaselatan.imigrasi.go.id

PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

Yth. Pimpinan Perusahaan/Pengelola Apartemen

Pada hari ini perusahaan/apartemen anda terpilih sebagai subjek untuk pemeriksaan pengawasan keimigrasian, pengawasan keimigrasian dilakukan dengan dasar Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 66 ayat 2 huruf b yaitu pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

1. Kewajiban Orang Asing/Perusahaan/Pemilik atau pengurus penginapan
 - a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan (pasal 71 huruf a UU No 6 Th 2011)
 - b. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan (Paspor) dan ijin tinggal ketika diminta Pejabat Imigrasi (Pasal 71 huruf b)
 - c. Memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya (pasal 72 ayat 2)
2. Kewajiban-kewajiban diatas apabila tidak dapat dipenuhi dapat diancam pidana kepada orang asing ataupun Perusahaan atau pemilik, pengurus penginapan (pasal 116, 117 dan 136)
3. Berkaitan dengan informasi diatas kami mohon agar anda
 - a. Bekerjasama dengan tertib dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian ini
 - b. Menunjukkan Struktur Organisasi (untuk perusahaan)
 - c. Memberikan daftar orang asing yang ada pada perusahaan/penginapan
 - d. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Petugas dengan jujur
 - e. Mendampingi petugas imigrasi yang untuk bertemu dan melakukan wawancara terhadap orang asing yang ada di lokasi saudara
 - f. Petugas di lapangan akan mengambil Berita Acara Pemeriksaan Singkat, sebagai laporan situasi konkret yang ada di lokasi saudara, setelah dibaca ulang harap ditandatangani dan dicap perusahaan.
4. Apabila ditemukan hal-hal yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lokasi saudara, maka petugas berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Ketingan, Surakarta, 57126
Telp./Fax. (0271) 664989 ; web: <http://hukum.uns.ac.id>, e-mail: fh.uns@uns.ac.id

Nomor : 2508 /UN27.03/PI/2018
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memohonkan ijin bagi mahasiswa :

Nama : Galih Putra Destianto
N I M : E0015159
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Mohon diterima untuk melakukan penelitian di **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**, yang akan dilaksanakan pada tanggal **1 November 2018** s.d selesai.

Dengan judul :

EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 01 NOV 2018

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Moch. Nabil Imanullah, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 195908031985031001

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, 57126

Telp./Fax. (0271) 664989 ; web: <http://hukum.uns.ac.id>, e-mail: fh.uns@uns.ac.id

Nomor : 2500 /UN27.03/PI/2018
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta.

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memohonkan
ijin bagi mahasiswa :

Nama : Galih Putra Destianto
N I M : E0015159
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Mohon diterima untuk melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Gambir,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November
2018 s.d selesai.

Dengan judul :

**EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Surakarta, 01 NOV 2019
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 195908031985031001

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, 57126

Telp./Fax. (0271) 664989 ; web: <http://hukum.uns.ac.id>, e-mail: fh.uns@uns.ac.id

Nomor : 2410/UN27.03/PI/ 2018
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
di Jalan M.T. Haryono Nomor 24, Cawang, Jakarta Timur
DKI Jakarta.

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memohonkan ijin bagi mahasiswa :

Nama : Galih Putra Destianto
N I M : E0015159
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Mohon diterima untuk melakukan penelitian di **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Jalan M.T. Haryono Nomor 24, Cawang, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta** yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 s.d selesai.

Dengan judul :

**EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 26 Oktober 2018

Atas Nama Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 195908031985031001

Lampiran 5. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik JL HR Rasuna Said Kav C 22 Telepon : 021-50810900
JAKARTA Kode Pos : 12940

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 741/AF.1/31/-1.862.9/2018

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 2508/UN27.03/PI/2018 Tanggal 01 November 2018;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Riset, Observasi, Survei, Wawancara, Studi Kasus, Polling/Jajak Pendapat, Studi Kepustakaan, Pendataan dan Sejenisnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Galih Putra Destianto
2. No. KTP : 3174062112960006
3. Alamat : Jl Melati II RT 008/002 Kel Pondok Labu Kec Cilandak, Jakarta Selatan
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Riset, Observasi, Survei, Wawancara, Studi Kasus, Polling/Jajak Pendapat, Studi Kepustakaan, Pendataan dan Sejenisnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Efisiensi Fungsi Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta Pada Era ASEAN Economic Community
b. Tempat/Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
c. Bidang Penelitian : Hukum Administrasi Negara
d. Waktu : 09 November 2018 s.d 1 Januari 2019
e. Nama Lembaga : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 9 November 2018
a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No.36 A, Ketingan, Surakarta, 57126
Telp./Fax. (0271) 664989 ; web: <http://hukum.uns.ac.id>, e-mail: fh.uns@uns.ac.id

Nomor : 2508 /UN27.03/PI/2018
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta.

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memohonkan
ijin bagi mahasiswa :

Nama : Galih Putra Destianto
NIM : E0015159
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Mohon diterima untuk melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Gambir,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November
2018 s.d selesai.

Dengan judul :

**EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 01 NOV 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 195908031985031001

PEMERINTAH PROP DKI JAKARTA DINAS NAKERTRAN- Jalan Prapatan No. 52 Jaka:	SURAT NO :	
	TANGGAL :	
	HAL :	
	SAMA HARI TGL TTD :	<i>19/11/18</i> <i>Egit</i>

021 371 7616 (Surakarta)

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta



Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

